

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak dalam suatu negara dapat dikatakan berhasil karena lancarnya perputaran ekonomi dinegara tersebut, perputaran ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam ataupun luar negeri. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, maka negara dapat mengambil keuntungan dari setiap kegiatan perusahaan tersebut. Melalui pajak yang paling utama, dengan demikian negara memperoleh keuntungan. Ukuran dalam membayar pajak dapat terlihat dari ukuran perusahaan, dan ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya dari kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyakut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. “Kinerja merupakan penilaian perilaku manusia dalam suatu organisasi untuk tercapainya tingkat prestasi atau hasil nyata yang positif. “Kinerja keuangan adalah prestasi dibidang keuangan yang unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, keadaan operasional secara keseluruhan, struktur utang dan hasil investasi. Penilaian kinerja keuangan berbeda dengan penilaian barang baik berwujud maupun tidak berwujud. (Mulyadi, 2001)

Jika berbicara mengenai kinerja sudah pasti akan berbicara mengenai pajak, dikarenakan pajak merupakan pendapatan terbesar pada suatu negara pada era saat ini. Dalam sebuah perusahaan, pajak dapat menjadikan sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba. Dengan kata lain pajak tersebut dianggap menjadi satu elemen yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga terkadang perusahaan-perusahaan sengaja mengecilkan angka kinerjanya agar tidak terlihat baik, dengan salah satu caranya yaitu pembelian aset. Dengan mengurangi laba operasional dengan pajak yang diperlukan, seseorang dapat menentukan laba bersih perusahaan mana pun. Margin laba bersih, juga dikenal sebagai selisih laba bersih,

adalah ukuran yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan berapa banyak laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan pendapatannya. (MOHAMMAD SOFYAN, 2019) menyatakan bahwa Net Profit Margin adalah suatu rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan bersih bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang dilakukan. (Yasa & Wirawati, 2016) menyatakan bahwa net profit margin (NPM) merupakan salah satu dari rasio profitabilitas yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan.

Berdasarkan informasi yang terdapat didalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan dimasa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Pajak tangguhan adalah akumulasi kewajiban pajak yang diharapkan dapat terjadi saat ini atau di masa depan sebagai akibat dari penundaan pengakuan kewajiban pajak penghasilan. Masalah pajak tangguhan muncul dari perbedaan antara pengakuan pajak dan pengakuan akuntansi. (Bhaktiar & Hidayat, 2020). Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu (Astutik & Mildawati, 2016). Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif.

Pajak badan dapat dilihat dari beban pajak penghasilan yang merupakan jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan sepanjang satu tahun. Total beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan ini pada umumnya timbul dari dua kewajiban, yaitu : (1) kewajiban pajak saat ini, terhutang sebagai konsekuensi dari besarnya laba kena pajak untuk periode berjalan, (2) kewajiban pajak yang ditangguhkan ,sebagai

konsekuensi dari besarnya jumlah kena pajak di masa yang akan datang. Sedangkan asset pajak yang ditangguhkan justru akan mengurangi total beban pajak penghasilan karena menimbulkan pajak tangguhan.

Terdapat suatu fenomena yang diambil dari sumber [pasardana.id](https://pasardana.id) (2022) PT Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) membukukan laba bersih sebesar Rp24,984 miliar dalam tiga bulan pertama tahun 2022, atau membaik dibandingkan periode sama tahun 2021 yang mencatatkan rugi bersih senilai Rp396,82 miliar. Sehingga emiten telekomunikasi grup Sinarmas ini menorehkan laba per saham dasar Rp0,08, sedangkan di akhir Maret 2021 masih rugi per saham sebesar Rp1,28. Data tersebut tersaji dalam laporan keuangan kuartal I 2022 tanpa audit FREN yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI). Jelasnya, pendapatan usaha tumbuh 11,3 persen menjadi Rp2,678 triliun, ditopang pendapatan data sebesar Rp2,407 triliun atau tumbuh 9,2 persen dibanding kuartal I 2021 sebesar Rp2,204 triliun. Walau beban usaha membengkak 2,25 persen menjadi Rp2,542 triliun. Namun perusahaan dapat membukukan laba usaha senilai Rp136,55 miliar, atau membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat rugi usaha Rp80,407 miliar. Menariknya perseroan membukukan laba dari entitas asosiasi senilai Rp31,938 miliar. Ditambah keuntungan dari nilai wajar opsi konversi senilai Rp11,108 miliar, atau membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang rugi dari konversi perubahan nilai wajar opsi konversi senilai Rp9,535 miliar.

Hasilnya, rugi sebelum pajak menyusut 80,8 persen dan tersisa Rp95,73 miliar. Meski demikian, kinerja FREN tertolong setelah perseroan mendapatkan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp120,72 miliar, atau tumbuh 22,4 persen dibandingkan kuartal I 2021 sebesar Rp98,92 miliar. Sehingga, perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp24,987 miliar, atau membaik dibanding kuartal I 2021 yang mencatatkan rugi periode berjalan Rp396,83 miliar. Sementara itu, aset perseroan tumbuh 1,4 persen menjadi Rp43,976 triliun, ditopang kenaikan kewajiban sebesar 1,93 persen menjadi Rp31,297 triliun.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak ada dua hal yang perusahaan lakukan yakni dengan cara penghindaran pajak atau penggelapan pajak, kedua hal tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak. Perusahaan yang melaksanakan

perencanaan pajak dengan sehat akan menunjukkan tidak banyak perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Yang dapat kita lihat didalam rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (*Tax to book ratio*). *Tax to book ratio* merupakan perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (*taxable income*) terhadap laba akuntansi (*book income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Suatu perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan, akan tetapi tujuan utama dari pendirian perusahaan tersebut adalah untuk memperoleh laba. Laba tersebut diantaranya adalah laba usaha dan laba bersih. Laba usaha dapat diketahui apabila dihitung dengan cara mengurangi total penjualan dengan biaya-biaya dalam proses produksi dan operasionalnya, sedangkan untuk mengetahui laba bersih perusahaan dapat diketahui apabila dihitung dengan cara mengurangi jumlah laba usaha yang dihasilkan dengan pajak.

Selanjutnya, dikutip dari CNBC (2021). PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) melaporkan laba bersih sebesar Rp 24,76 triliun tahun lalu, naik 19% dari Rp 20,8 triliun yang diproyeksikan untuk tahun 2020. Menurut laporan keuangan yang dirilis pada 19 April 2022, laba bersih per saham juga meningkat, mencapai Rp 249,94 pada 2021 dibandingkan Rp 210,01 pada 2020. Pertumbuhan pendapatan juga berdampak pada hubungan antara laba bersih dan pendapatan. Pada tahun 2021, pendapatan Telkom mencapai Rp143,21 triliun, meningkat 4,9% dari Rp136,46 triliun pada tahun sebelumnya. "Selama tahun 2021, pendapatan konsolidasi Telkom meningkat 4,9% secara tahunan mencapai Rp 143,2 triliun, dengan mobile data dan IndiHome yang menopang pertumbuhan lebih lanjut." Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, pengeluaran juga meningkat. Jumlah yang dibelanjakan untuk operasi, pemeliharaan, dan layanan telekomunikasi adalah sebesar Rp 38,13 triliun pada tahun 2021, meningkat 10,2% dari Rp 34,59 triliun pada tahun 2020. Sebaliknya, biaya penyerapan meningkat menjadi Rp 31,82 miliar pada tahun 2021, meningkat 10,1% dari Rp 28,89 miliar pada tahun 2020. Setelah dikurangi pos-pos biaya dan beban lainnya, laba usaha mencapai Rp 47,56 miliar pada tahun 2021, meningkat 9,3% dari Rp 43,50 miliar pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kami membukukan Laba Bersih sebesar Rp 24,8 triliun atau melonjak sebesar 19,0% YoY dengan margin Laba Bersih 17,3% dibandingkan 15,2% tahun lalu," ungkap Telkom. Telkom diketahui juga mencatat keuntungan yang belum

direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi sebesar Rp 3,4 triliun untuk mengakui sekitar Rp 2,5 triliun peningkatan valuasi dari investasi di GoTo dan Rp 899 miliar untuk mengakui valuasi investasi yang lebih tinggi oleh MDI dalam portofolio perusahaan digital. Total aset pada akhir Desember 2021 mencapai Rp 277,2 triliun, meningkat 12,2% YoY. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan kas & setara kas sebagai dampak dari IPO Mitratel dan peningkatan dalam nilai wajar investasi di GoTo dan MDI investee. Sementara itu total kewajiban selama tahun 2021 naik 4,5% YoY menjadi Rp 131,8 triliun terutama karena peningkatan utang perusahaan, pada saat yang sama untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

Dengan adanya fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa jika kinerja suatu perusahaan meningkat atau dapat dikategorikan baik, maka laba yang diperoleh akan semakin besar. Dengan meningkatnya jumlah laba, maka kinerja keuangan suatu perusahaan juga akan mengalami peningkatan, dengan mengalami peningkatan ini perusahaan seharusnya membayarkan pajak kepada negara akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan didapatkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, *TAX TO BOOK RATIO*, DAN *NET PROFIT MARGIN* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pajak tangguhan, *tax to book ratio*, dan *net profit margin* mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap perusahaan sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021?
2. Apakah *tax to book ratio* berpengaruh terhadap perusahaan sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021?
3. Apakah *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap perusahaan sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021
2. Untuk menganalisis apakah *tax to book ratio* berpengaruh terhadap sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis apakah *Net Profit Margin* berpengaruh pada perusahaan sektor infrastruktur di bursa efek Indonesia dari tahun 2017-2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai pengembangan teori dalam menghadapi permasalahan perpajakan yang terjadi di Indonesia.
- b. Sebagai bahan penelitian dan kajian tentang kinerja keuangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademis dan peneliti, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya perpajakan, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
- b. Memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam menangani kinerja keuangan.

